

## **Implementasi Industri Kreatif dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah: Banyuwangi Ethno Carnival**

Inti Wasiati  
[inti\\_w.fisip@unej.ac.id](mailto:inti_w.fisip@unej.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis industri kreatif dalam program pengembangan nilai budaya daerah melalui Banyuwangi Ethno Carnival (BEC). Dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa dokumentasi dan studi pustaka. Penulis menganalisis data yang telah terkumpul untuk menghasilkan sebuah informasi yang mendeskripsikan *Banyuwangi Ethno Carnival* sebagai bagian dari industri kreatif dalam pengembangan nilai budaya daerah. Analisis mengungkap bahwa stakeholder dan lembaga yang terlibat dalam BEC 2011 sampai 2014 yaitu Disbudparda Banyuwangi, Manajemen Jember Fashion Carnavaal (JFC), Dewan Kesenian Blambangan dan Instruktur Karnaval. Mulai tahun 2015, tiga institusi lokal yaitu Disbudparda Banyuwangi, Dewan Kesenian Blambangan, dan Instruktur Karnaval berperan sentral dalam program BEC. Secara umum terdapat dua pola kerja sama dalam BEC yaitu: (1) Pola *Public-Private Partnership* di Tahun 2011, dan (2) *Collaborative Governance* di tahun 2012 sampai 2017. Hambatan, tantangan dan solusi dalam membangun *Collaborative Governance* terdapat pada faktor kebudayaan dan institusi yang terlibat. Institusi yang terlibat kemudian membangun konsensus untuk mengatasi perbedaan tadi untuk melakukan pengorganisasian dan pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* dengan sukses.

**Kata Kunci:** Industri Kreatif, Pengambil Kebijakan, Hubungan Khusus Umum, Pemerintahan Kolaboratif, Banyuwangi Ethno Carnival

### **Abstract**

*This article aims at analyzing the implementation of creative industri in the regional development of cultural values program in the form of Banyuwangi Ethno Carnival. The writers employed a descriptive qualitative analysis research, by utilizing and analyzing secondary and library data. Afterward, the writers analyzed the data to derive an analysis that describes Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) as a part of creative industri program in the development of local cultural values. The analysis found the stakeholders and institutions that were involved in the BEC programs since 2011 through 2014 were Culture and Tourism Office of Banyuwangi, Management of Jember Fashion Carnavaal (JFC), Blambangan Arts Council, and Carnival Instructors. Starting from 2015 onward, three local institutions, namely Culture and Tourism Office of Banyuwangi, Blambangan Arts Council of Banyuwangi, and Carnival Instructors played central roles in the BEC program. Two patterns of cooperation existed in the BEC program, namely: (1) Public-Private Partnership in 2011, (2) Collaborative Governance from 2011 through 2017. Differences, challenges, and solutions in forging the Collaborative Governance lied in the cultural factors and the institutions involved. Involved institutions built a consensus to bridge these differences to arrive at solutions to execute a successful organization and performance of Banyuwangi Ethno Carnival.*

**Keywords:** *Creative Indsutry, Stakeholder, Public-Private Partnership, Collaborative Governance, Banyuwangi Ethno Carnival.*

## Pendahuluan

Industri kreatif adalah upaya mendefinisikan dan mendefinisikan ulang aspek seni dan budaya sebagai sektor industri (Simon Roodhouse, 2008). Penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* secara rutin setiap tahun menurut Richards & Wilson (2006) berfungsi sebagai “serial reproduction of culture.” UNESCO mengasosikan industri kreatif dengan industri budaya yang memadukan kreasi, produksi, dan komersialisasi konten budaya yang tidak berbentuk (*intangible*) dan terkandung dalam budaya (UNESCO 2017). Selain itu, *Banyuwangi Ethno Carnival* berperan dalam meningkatkan ekonomi-rakyat Banyuwangi ([www.rmol.co](http://www.rmol.co)). *Banyuwangi Ethno Carnival* menjadi salah satu event Kebudayaan Unggulan andalan bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Indikasi tersebut tidak terlepas dari usaha pemerintah Banyuwangi mendorong *Banyuwangi Ethno Carnival* diadakan secara rutin setiap tahun dan menjadi acara yang berskala internasional.

Tahun 2014 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mendukung *Banyuwangi Ethno Carnival* masuk kalender pariwisata nasional. Menteri Pariwisata Arief Yahya, mengagendakan acara *Banyuwangi Ethno Carnival* masuk dalam promosi wisata yang mencakup nasional maupun mancanegara. Lebih lanjut, Arief Yahya menyatakan setuju dan mendukung *Banyuwangi Ethno Carnival* masuk kalender pariwisata nasional dan agenda wisata bagus seperti di Banyuwangi ini promosinya jangan hanya lokal, tapi juga harus internasional ke mancanegara" (Antaraneews.com).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil dalam melaksanakan *Banyuwangi Ethno*

*Carnival* secara rutin setiap tahun dan mampu menunjukkan komitmen dalam mengkolaborasikan budaya lokal dengan kemasan modernitas pada setiap penyelenggaraan acara. Penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* secara rutin setiap tahun menunjukkan bahwa pemerintah dan rakyat Kabupaten Banyuwangi berupaya membangun industri kreatif dengan mendefinisikan dan mendefinisikan ulang dan memproduksi budaya secara serial aspek seni dan budaya sebagai sektor industri, dan diselenggarakan secara rutin setiap tahun.

Pada awal pelaksanaannya di tahun 2011, *Banyuwangi Ethno Carnival* mengambil tema “Gandrung, Damarwulan, dan Kunderan” sebagai tema acara. Pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* di tahun 2012 mengambil tema “Re-Barong Using.” *Banyuwangi Ethno Carnival* di tahun 2013 mengambil tema “The Legend of Kebo-Keboan.” Penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2014 mengambil tema “Tari Seblang,” ([banyuwangibagus.com](http://banyuwangibagus.com)). Untuk tahun 2015 mengambil tema “Busana Pengantin Suku Using (Usingnese Royal Wedding ), ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Tema tahun 2016 adalah “*The Legend of Sritanjung Sidopekso*,” yang mengangkat legenda rakyat yang menceritakan asal usul nama Banyuwangi ([www.rmol.co](http://www.rmol.co)). *Banyuwangi Ethno Carnival* 2017 mengangkat tema “Majestic Ijen.” ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

*Banyuwangi Ethno Carnival* yang dilaksanakan secara rutin dengan kolaborasi budaya lokal dan desain modernitas mampu memberikan dampak terhadap citra budaya Banyuwangi di lingkup nasional. Salah satu pencapaian positif yang diberikan dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* adalah penghargaan

Kebudayaan 2015 yang di berikan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tanpa mengesampingkan kegiatan kebudayaan lain yang ada di Banyuwangi. Salah satu poin yang mendapatkan nilai lebih dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata terkait pelestarian budaya Banyuwangi adalah usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Banyuwangi dalam menjalankan berbagai even kebudayaan secara konsisten dan budaya daerah ditampilkan secara berbeda dan istimewa (banyuwangikab.go.id).

Kesuksesan yang di capai dalam setiap penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku penanggung jawab acara melibatkan aktor non-pemerintah dalam setiap penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

Konsep yang dibangun dalam *event Banyuwangi Ethno Carnival* adalah karnaval dengan desain kolaborasi budaya lokal dengan desain modernitas, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan peran sumber daya non-pemerintah agar mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival*, antara lain.

1. Melibatkan Manajemen *Jember Fashion Carnival* yang telah sukses menyelenggarakan *Jember Fashion Carnival* sebagai *Event Organizer*;
2. Dewan Kesenian Blambangan;
3. Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi.

Pola kerja sama yang terbangun antara Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan *stakeholder* non-pemerintah adalah bersifat kolaborasi. Secara definitif menurut Ansell dan Gash (2007:2) *Collaborative Governance* adalah “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or asset (Pengaturan yang mengatur pada satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta hal itu bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen program-program atau aset publik).

Pada pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memberikan peran kepada masing-masing *stakeholder* untuk melaksanakan fungsi kerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pemerintah Banyuwangi melaksanakan kerja sama dengan *event organizer* Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai konsultan acara *Banyuwangi Ethno Carnival*. Hasil wawancara dengan Iwan, Staff Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai berikut.

“Keikutsertaan Manajemen *Jember Fashion Carnival* tidak terlepas dari keinginan pemerintah Banyuwangi untuk membantu menyelenggarakan Banyuwangi *Ethno Carnival*. Tim Manajemen JFC adalah yang terbaik dalam menyelenggarakan *event* karnaval mulai dari pelaksanaan karnaval di Tenggarong sampai di Solo. Kerja sama yang terjalin

antara kami dengan pemerintah bersifat MoU dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan kontrak kerja tersebut kami terikat dalam 3 kali pelaksanaan karnaval. Kami diberikan tugas untuk menjadi konsultan BEC serta mendelegasikan penari kami untuk terlibat di acara dan menerjunkan instruktur untuk melatih peserta” (Senin, 25 Januari 2016).

Untuk pagelaran tahun 2013 dan 2014 pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjuk Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi untuk menggantikan peran Manajemen JFC sebagai Instruktur Karnaval *Banyuwangi Ethno Carnival*. Penunjukan tim instruktur karnaval tersebut tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki *skill* dalam memberikan pelatihan kepada peserta *Banyuwangi Ethno Carnival*. Berikut adalah wawancara dengan Ainur Rofiq, Kasi Informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

“Untuk menggantikan peran Manajemen *Jember Fashion Carnival* yang tidak melanjutkan kerja sama pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival 2013*, kami menunjuk instruktur karnaval putra asli Banyuwangi sebagai instruktur karnaval. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi instruktur Karnaval *Banyuwangi Ethno Carnival* setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Manajemen JFC” (Rabu, 13 Januari 2016).

Pada pelaksanaan *event Banyuwangi Ethno Carnival* Dewan Kesenian Blambangan berperan untuk memberikan pertimbangan dalam setiap penentuan tema cara maupun

memberikan masukan terkait instrumen-instrumen budaya yang menjadi ciri khas. Motif keterlibatan Dewan Kesenian Blambangan yang menaungi budayawan tradisional Banyuwangi untuk terlibat dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* adalah untuk menjaga keaslian budaya Banyuwangi. Sikap dari Dewan Kesenian Blambangan tersebut ada dikarenakan konsep yang dibawakan dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* mengkolaborasikan antara unsur tradisional dengan unsur modern. Landasan sikap menjaga tradisi yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Blambangan mengacu pada SK yang diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi di tahun 2010 tentang tugas Dewan Kesenian Blambangan untuk terlibat dalam pengembangan dan menjaga budaya asli Banyuwangi. Pernyataan dari Bambang Lukito, sekretaris Dewan Kesenian Blambangan menjelaskan bahwa:

“Dewan Kesenian Blambangan merupakan sebuah wadah bagi budayawan Banyuwangi sejak tahun 80-an untuk mengamati perkembangan sekaligus pelestarian budaya asli Banyuwangi. Dewan Kesenian Blambangan mendapatkan legitimasi dari pemerintah untuk mengamati budaya Banyuwangi mengacu pada SK Bupati. Pada pelaksanaan BEC, sejak awal Dewan Kesenian Blambangan telah diajak berkomunikasi oleh Azwar Anas untuk membicarakan pelaksanaan karnaval budaya di Banyuwangi. Kami memberikan banyak sekali pertimbangan terkait kebutuhan yang diperlukan dalam menyelenggarakan acara tersebut. Pada beberapa tahapan lanjutan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kami diajak untuk berperan serta lebih jauh. Memang

keterlibatan Dewan Kesenian Blambangan dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* tidak bersifat kontrak kerja, tetapi ketika kegiatan tersebut menyangkut aspek kebudayaan otomatis kami akan terlibat langsung di dalamnya. Segala aspek yang menyangkut budaya lokal Banyuwangi menjadi hak dari Dewan Kesenian Blambangan untuk terlibat langsung didalamnya” (Kamis, 14 Januari 2016).

Adapun telaah kajian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola industri kreatif dalam berperan dalam pengembangan nilai budaya daerah dan *Collaborative Governance* dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011-2014?
2. Bagaimana peran dan mekanisme kerja masing-masing *stakeholder* dalam tahapan penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011-2014.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola terbentuknya *Collaborative Governance* dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* dan peran dan mekanisme kerja masing-masing *stakeholder* dalam tahapan penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011-2014.

## Tinjauan Pustaka

### Industri Kreatif

Roodhouse (2008) merujuk industri kreatif sebagai usaha mendefinisi dan mendefinisi-ulang aspek seni dan budaya sebagai sektor industri. Di sisi lain, UNESCO (2017) mengaitkan industri kreatif dengan industri budaya yang memadukan kreasi, produksi, dan komersialisasi

konten budaya yang tidak berbentuk (*intangible*) dan terkandung dalam budaya.

### Nilai Budaya

Para pakar antropologi Indonesia umumnya sependapat bahwa kata "kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *Buddhayah*. Kata *Buddhayah* adalah bentuk jamak dari budi atau akal (Maran, 2007:24). Menurut Koentjaraningrat dalam Maran (2007:4) secara etimologis, kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal. Kata kebudayaan bisa di seajarkan dengan kata *culture*. kata *culture* berasal dari bahasa latin *colere* yang berarti merawat, memelihara, menjaga, mengolah. Menurut Cliffort Geert dalam Tuloli *et al* (2003:2) Mendefinisikan Kebudayaan adalah sistem pemaknaan yang dimiliki bersama dan merupakan hasil dari proses sosial dan bukan dari proses individu.

### Stakeholder

Definisi *Stakeholder* menurut Freeman dan Reed (1983:91) adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Mengacu pada asumsi Freeman, *stakeholder* dalam satu kondisi waktu dapat mempengaruhi dan pada kondisi tertentu dapat dipengaruhi oleh suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan.

### Public Private Partnership

Menurut Nijkamp dalam Subarsono *et al* (2016: 173) *public private partnership* adalah suatu bentuk hubungan kelembagaan antara pemerintah dan swasta, yang didasari

oleh objek, komitmen kerja sama dan tiap pihak bersedia menerima risiko sesuai dengan pendapatan dan biaya. Sedangkan menurut Van Ham dan Koppenjan dalam Subarsono *et al* (2016: 179), *Public Privat Partnership* merupakan kerja sama antara aktor-aktor publik-swasta di mana mereka bersama-sama mengembangkan produk dan jasa serta pembagian risiko, biaya dan sumber daya yang dihubungkan dengan produk dan pelayanan.

### **Teori Governance**

Sejak pertama kali muncul, paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengalami beberapa fase perubahan. Menurut Chemma dalam Keban (2008: 37) terdapat 4 fase perkembangan paradigma dalam administrasi publik yaitu fase *Traditional Public Administration*, *Public Management*, *New Public Management* dan paradigma *Governance*.

### **Collaborative Governance**

Menurut Ansell dan Gash (2007:2) *Collaborative Governance* adalah aransmen pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan secara langsung *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik.

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007:8) terdiri atas beberapa tahapan berikut:

#### **1. Starting Condition (Kondisi**

##### **Awal)**

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-

masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

#### **2. Kepemimpinan Fasilitatif**

Ryan dalam Ansell dan Gash (2007:12) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;
- b. pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
- c. memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

#### **3. Desain Institusional**

##### **(Institusional Design)**

Ansell dan Gash (2007: 13) mendeskripsikan bahwa Desain institusional mengacu pada protokol protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus di tekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

#### **4. Proses Kolaborasi (Collaborative Process)**

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut:

- a. Dialog tatap muka (*Face to face*).
- b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).
- c. Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*).
- d. *Share Understanding*.
- e. Hasil sementara.

### **Koordinasi Pelaksanaan Program**

Kordinasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila seluruh *stakeholder*, terutama penanggung jawab utama implementasi, perlu memahami mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program. Menurut Hall dan O'Toole, Jr. dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:154) terdapat tiga kategori mekanisme kerja atau hubungan antar *Stakeholder* yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan atau pelaksanaan program, sebagai berikut:

- a. Proses Implementasi dengan Menggunakan Mekanisme Kerja Mengutub (*Pooled*).
- b. Proses Implementasi dengan Menggunakan Mekanisme Kerja Berurutan (*Sequential*).
- c. Proses Implementasi dengan Menggunakan Mekanisme Kerja Timbal-Balik (*Reciprocal*).

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Ndraha (1987:39) penelitian deskriptif bermaksud untuk meneliti dan menemukan informasi seluas-luasnya tentang variabel yang bersangkutan. Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2004:3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada *setting* sosial tertentu tidak dimaksudkan untuk mewakili atau sebagai representasi dari latar tertentu. Hal ini disebabkan oleh sifat penelitian kualitatif yang sangat kontekstual dan berupaya untuk menelaah fenomena sosial pada level mikro, dan tidak bermaksud melakukan generalisasi (Bungin, 2012: 45). Penelitian akan dilaksanakan kepada beberapa *stakeholder* pelaksanaan *event Banyuwangi Ethno Carnival*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten merupakan instansi yang memiliki otoritas sebagai penanggung jawab program.
2. Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai Konsultan *Banyuwangi Ethno Carnival* Tahun 2011 dan 2012.
3. Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi sebagai instruktur *Banyuwangi Ethno Carnival* 2013 dan 2014.
4. Dewan Kesenian Blambangan yang memiliki peran dalam memberikan pertimbangan kebudayaan dalam pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi yang sudah mengolah data yang diperlukan dalam penelitian.

Berdasarkan beberapa indikator yang tercantum dalam RENSTRA (Rencana Strategis) serta otoritas yang dimiliki oleh pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, maka beberapa pihak yang menjadi informan sebagai berikut:

1. Kasi Informasi Budaya dan Pariwisata Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
2. Anggota Manajemen *Jember Fashion Carnival*.
3. Ketua Komunitas Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi.
4. Pengurus Dewan Kesenian Blambangan.

Pada penelitian tersebut wawancara dilaksanakan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Manajemen *Jember Fashion Carnival*, Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi dan Dewan Kesenian Blambangan. Penelitian ini mencari data dokumen terkait dengan profil kegiatan, pelaksanaan program, dan peran masing-masing aktor pelaksana pada *Event Banyuwangi Ethno Carnival*.

### **Banyuwangi Ethno Carnival**

*Banyuwangi Ethno Carnival* (BEC) melibatkan berbagai *stakeholder* dan institusi baik dari pemerintahan Kabupaten Banyuwangi maupun swasta. Mereka terlibat bersama dan melakukan kerja sama sejak dari perencanaan, pendanaan, dan penyelenggaraan program BEC. Ciri dari kerja sama ini karena melibatkan pihak pemerintahan dan swasta, maka kerja sama ini bersifat *Public-Private Partnership*. Selain itu, kerja sama semacam dari sisi teoretis mempunyai ciri sebagai *Collaborative Governance*, penyelenggaraan program pemerintahan yang melibatkan

berbagai *stakeholder*, institusi pemerintahan dan swasta, termasuk juga dengan institusi sejenis dari daerah lain.

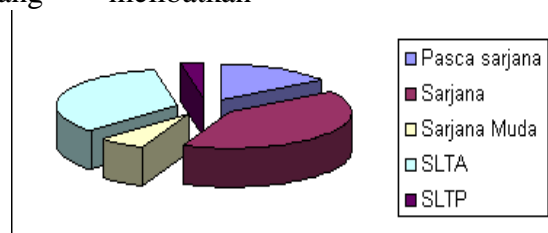
Beberapa institusi yang terlibat kerja sama dan berjasa dalam penyelenggaraan program BEC, antara lain adalah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Dean Kesenian Blambangan Kabupaten Banyuwangi, dan *Jember Fashion Carnavaal (JFC)*.

#### **1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dan mempunyai fungsi dalam bidang:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memiliki sumber daya manusia sebanyak 35 orang, dengan rincian pendidikan: 4 orang pasca sarjana (11%), 6 sarjana (17%), 12 SLTA (34%), dan 3 SLTP (9%).



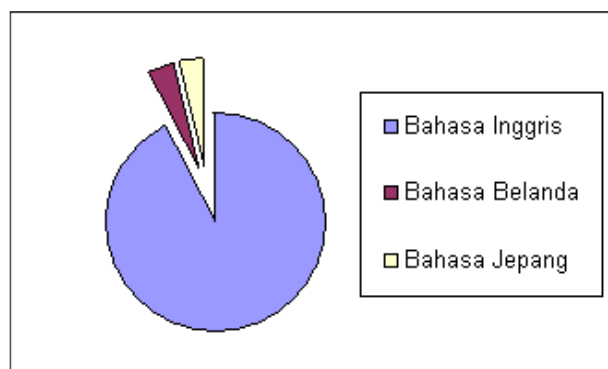
**Gambar 1 Jenjang Pendidikan Pejabat Disparda Banyuwangi**



Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi

Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga didukung oleh tenaga pramuwisata yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)

Cabang Banyuwangi yang berjumlah 27 orang, dengan spesialisasi: (1) Bahasa Inggris: 25 orang, Bahasa Belanda: 1 orang, dan Bahasa Jepang: 1 orang.



**Gambar 2 Keahlian Bahasa HPI Cabang Banyuwangi**

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi

## 2. Profil Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Kabupaten Banyuwangi

Pembentukan Dewan Kesenian Blambangan tidak terlepas dari kondisi budaya yang telah di wariskan oleh leluhur sampai sekarang ini di Banyuwangi. Pembentukan Dewan Kesenian Blambangan oleh upaya yang dilaksanakan para budayawan Banyuwangi dengan berbagai macam latar belakang profesi dan keahlian. Pertimbangan utama dalam pembentukan wadah tersebut adalah untuk menggali, membina, dan melestarikan seni atau cagar budaya dan kepariwisataan yang tumbuh di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu, perlu di lakukan upaya pengembangan dan pelestarian seni budaya dan kepariwisataan tersebut melalui wadah kreatifitas dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan masyarakat. Pembentukan Dewan Kesenian Blambangan berdasarkan pada keputusan Bupati Banyuwangi. Pada pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* terdapat dua periode

kepengurusan yang terlibat yaitu periode kepengurusan Dewan Kesenian Blambangan (DKB) 2010-2013 dan 2014-2018.

### **Industri Kreatif, *Public-Private Partnership*, dan *Collaborative Governance* dalam Banyuwangi Ethno Carnival**

Penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* merupakan implementasi kebijakan industri kreatif dengan memberdayakan dan mengelola aspek seni dan budaya lokal sebagai sektor industri (Rodhouse, 2008). *Banyuwangi Ethno Carnival* juga merupakan implementasi dari industri kreatif yang merujuk kepada industri budaya yang memadukan kreasi, produksi, dan komersialisasi konten budaya yang tidak berbentuk (intangible) dan terkandung dalam budaya (UNESCO, 2017).

Pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011 terdapat tiga *stakeholder* yang bekerja sama dalam penyelenggaraan karnaval yaitu: (1) Disbudparda Banyuwangi,

(2) Manajemen JFC, dan (2) Dewan Kesenian Blambangan. Pada penyelenggaraan BEC 2011 pola yang terbangun dalam kerja sama antar *stakeholder* berbentuk *public privat partnership*. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pola membangun kerjsama dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

Tahapan kerja sama diawali tatap muka yang mempertemukan antar *stakeholder* dalam merencanakan pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Dialog tatap muka dijalin antara Bupati dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai sektor pemerintah dengan non-pemerintah seperti Dewan Kesenian Blambangan dan Manajemen *Jember Fashion Carnival*. Dialog dan kerja sama ini merupakan sarana untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pandangan masing-masing pihak untuk pelaksanaan sebuah *event* karnaval di Kabupaten Banyuwangi. Mulanya muncul resistensi dari masing-masing *stakeholder* terkait persepektif penggabungan unsur budaya tradisional dengan kemasan modern. *Stakeholder* yang memiliki perbedaan pandangan adalah Manajemen JFC dengan Dewan Kesenian Blambangan.

Menurut Awaludin (2007: 113) terdapat lima bentuk *public private partnership* sebagai berikut.

- a. Kontrak pelayanan (*Service Contract*).
- b. Kontrak kelola (*Management Contract*).
- c. Kontrak sewa (*Lease Contract*).
- d. Kontrak bangun (*Rehabilitation*).
- e. Kontrak konsesi (*Concession Contract-CC*).

Kemudian ditempuh usaha jalinan kerja sama dan pembuatan konsensus untuk mengatasi perbedaan pendapat anatra masing-masing

*stakeholder*. Pada konteks kerja sama antar *stakeholder* dalam pelaksanaan BEC, masing-masing aktor menerapkan bentuk *public-private partnership* yang bersifat kontrak pelayanan. Secara definitif kontrak pelayanan adalah bentuk kerja sama yaitu: mitra swasta diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa, untuk suatu jenis pelayanan tertentu, dan dalam suatu jangka waktu tertentu. Dewan Kesenian Blambangan maupun Manajemen JFC menawarkan bentuk kontrak pelayanan dalam memberikan kinerjanya pada proses penyelenggaraan BEC.

Pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2012 sampai 2014 pola kerja sama antar *stakeholder* mengambil bentuk *collaborative governance*. Tahapan yang dilalui dalam setiap penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* meliputi tahapan sebagai berikut:

#### A. Dialog tatap muka

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi selaku penanggung jawab karnaval menginisiasi sebuah pertemuan dengan *stakeholder* yang terdiri dari Manajemen JFC dan Dewan Kesenian Blambangan. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas segala instrumen yang diperlukan dalam menyelenggarakan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Pertemuan tersebut bisa disebut sebagai awalan untuk menjalin kerja sama secara penuh dalam satu periode persiapan penyelenggaraan BEC. Pertemuan tersebut juga berbentuk non-formal sesuai dengan kebutuhan persiapan BEC.

#### B. Membangun *trust*

Terbentuknya kepercayaan antar pihak tidak terlepas dari komunikasi yang intens terjalin antara berbagai

pihak yang terlibat dalam *Banyuwangi Ethno Carnival*. Proses pertama terbentuknya *trust* tidak terlepas dari keterlibatan Manajemen JFC dan Dewan Kesenian Blambangan terlibat dalam kerja sama penyelenggaraan BEC 2011. Komunikasi informal dijalin secara intensif antara Manajemen JFC dengan Dewan Kesenian Blambangan dalam diskursus dalam mempersiapkan BEC. Komunikasi ini berdampak pada keterbukaan masing-masing *stakeholder* dalam memberikan perspektifnya dan memunculkan penurunan ego masing-masing pihak dalam memberikan masukan konsep penggabungan budaya tradisional dengan kemasan modern dalam BEC.

### C. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Procces*)

Komitmen masing-masing *stakeholder* dalam penyelenggaraan BEC mengacu pada teks MOU dan SK Bupati tentang Dewan Kesenian Blambangan (DKB). Legitimasi yang dimiliki oleh DKB untuk berperan serta menangani sektor budaya berlandaskan atas dukungan dari Bupati Banyuwangi melalui Surat Keputusan Bupati yang masing-masing diterbitkan pada periode 2010 dan 2014.

### D. Sikap saling memahami (*Shared Understanding*)

Pada pelaksanaan *collaborative governance* antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan Dewan Kesenian Blambangan dan Manajemen *Jember Fashion Carnival* adalah menjalankan langkah strategis untuk menentukan fase-fase persiapan penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator mengundang Manajemen *Jember Fashion Carnival* dan Dewan Kesenian Blambangan untuk

memberikan perspektif terkait peran masing-masing pihak dalam mensukseskan acara karnaval tersebut.

Konsensus yang tercapai tersebut menyangkut tahapan-tahapan persiapan karnaval, sebagai berikut.

- a. Penentuan tema *Banyuwangi Ethno Carnival*.
- b. Prototipe kostum peserta.
- c. Sosialisasi peserta.
- d. Musik pengiring *Banyuwangi Ethno Carnival*.
- e. Audisi peserta.
- f. Workshop *Banyuwangi Ethno Carnival*.
- g. Presentasi kostum.
- h. *Show time Banyuwangi Ethno Carnival*.

### Kesimpulan

*Banyuwangi Ethno Carnival* yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun dan mampu menunjukkan komitmen dalam mengkolaborasikan pembangunan dan pengembangan budaya lokal sebagai upaya industri kreatif, dengan kemasan modernitas pada setiap penyelenggaraan acara. Penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* adalah “*serial reproduction of culture*.”

Proses kerja sama antar-*stakeholder* di tahun 2011 masih berbentuk *public private partnership* karena belum terbentuk pola kerja sama yang stabil dan terstruktur. Pada tahun 2012 baru terbentuk sebuah *collaborative governance* yang stabil dengan tahapan kerja sama yang terstruktur. Tahapan kerja sama diawali dialog awal persiapan yang melibatkan tiga *stakeholder* dan didukung komunikasi informal dalam frame pembahasan masalah yang sama. Kemudian terbentuk juga *trust* antar masing-masing pihak dalam bekerja sama. Terbangun lanjutan komitmen

yang terlegitimasi oleh MoU dan SK Bupati terkait DKB. Proses *collaborative* terakhir adalah membangun sikap saling memahami yang menghasilkan *output* persiapan penyelenggaraan BEC. *Output* yang terbentuk dari proses membangun *collaborative* tersebut adalah tahapan operasional penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan perspektif penulis selama di lapangan, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran. Saran ini ditujukan untuk proses *collaborative governance* dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* di periode 2011 sampai 2014. Saran tersebut akan diindikasikan dalam beberapa poin, sebagai berikut:

1. Mendorong pembentukan badan hukum bagi komunitas Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi agar bisa langsung bekerja sama dalam *collaborative governance Banyuwangi Ethno Carnival* tanpa harus mengatasnamakan CV. Dinar sehingga tidak memerlukan pihak perantara dalam menjalin kerja sama antar pihak.
2. Perlunya penerbitan peraturan berbentuk SK oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kerja sama antar pihak sehingga landasan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* mempunyai kekuatan hukum.
3. Pemberian wadah aspiratif dengan membentuk forum komunikasi untuk mendengarkan aspiratif sekolah, universitas atau komunitas yang mendelegasikan personilnya sebagai peserta *Banyuwangi Ethno Carnival* untuk memberikan

perspektifnya terkait keperluan bagi para peserta yang perlu ditingkatkan.

4. Pembentukan wadah yang menampung peserta pemenang *Banyuwangi Ethno Carnival*, sehingga terdapat *reward* berupa ruang aktualisasi yang simultan dan berdampak pada meningkatkannya potensi masing-masing personil.

## Daftar Pustaka

- Ansell, C & Gash. A. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18:1-29. Oxford University Press.
- Anwar, Ruli. 2013. Banyuwangi Ethno Carnival Angkat Kebudayaan Lokal. Liputan 6.com. <http://citizen6.liputan6.com/read/687507/banyuwangi-ethno-carnival-angkat-kebudayaan-lokal>. (5 November 2015).
- Awaludin. 2007. *Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Pemerintahan*. Yogyakarta: Jogja Global Media.
- [Banyuwangibagus.com](http://Banyuwangibagus.com) (Diakses 3 November).
- [Banyuwangikab.go.id](http://Banyuwangikab.go.id). (Diakses 5 November).
- [Banyuwangitourism.com](http://Banyuwangitourism.com) (Diakses 7 November).
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Freeman, H & Reed, D. 1983. "Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate

- Governance.” *California Management Review*, 25 (3): 88-106. The Regents of the University of California.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hamdani, Irul. 2012. "Banyuwangi Ethno Carnival di Protes Budayawan Lokal." Detik.com.<http://hot.detik.com/read/2012/10/29/081624/2074627/475/banyuwangi-ethno-carnival-diprotes-seniman-lokal>. (7 November 2015).
- Harmawan, Bagus Nuari, Inti Wasiati, & Hermanto Rohman. 2017. "Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival." *e-SOSPOL* Vol. IV, No. 1. Januari 2017 [2017, IV (1): 1-14]
- Hutami, Gartiria. 2011. *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Keban, Yermias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Jember Fashion Carnival. Nomor: 188/5863/429.012/2011 tentang Penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*.
- Kusbiantoro, Didik. 2014. Kemenpar Dukung "Banyuwangi Festival Masuk Agenda Nasional." Antara.News.Com.<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/146029/kemenpar-dukung-banyuwangi-festival-masuk-kalender-wisata-nasional>.(5 November 2015).
- Maran, Raga Rafael. 2007. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Rineka.
- Moelong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Hasan. 2011. "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial." *Jurnal Administrasi Bisnis (2011)*, Vol.7, No.2: hal. 143–156.
- Nasution. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara
- Ningtyas, Ika. 2011. "Ribuan Warga Padati Banyuwangi Ethno Carnival." Tempo.com.<http://seleb.tempo.co/read/news/2011/10/22/161362775/ribuan-warga-padati-banyuwangi-ethno-carnival>. (3 November 2015).
- Pakta Integritas Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Untuk Paket Pekerjaan Audisi dan *workshop* peserta BEC 2013.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, D. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rachmawati, Ira. 2014. "Tiga Warisan Budaya Berasal Dari Banyuwangi." Kompas.com.<http://travel.kompas.com/read/2014/10/31/154852427/Tiga.Warisan.Budaya.Nasional.Berasal.dari.Banyuwangi>. (10 November 2015).
- RENJA (Rencana Kerja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- Kabupaten Banyuwangi 2011-2014.
- RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.
- Richards, Greg & Julie Wilson. 2006. "Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?" *Tourism Management* 27 (2006) 1209–1223.
- Roodhouse, Simon. 2008. "Creative Industries: The Business of Definition and Cultural Management Practice." *International Journal of Arts Management*, Vol. 11, No. 1 (FALL 2008), pp. 16-27. HEC - Montréal - Chair of Arts Management.
- Rosidi, Abidarini dan Anggraeni, R. Fajriani. 2013. *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Rossi, Peter H., Howard E. Freeman, & Mark W. Lipsey. 1998. *Evaluation A Systematic Approach*. SAGE Publications, Inc. 2455 Teller Road. Thousand Oaks, California 91320. Email: order@sagepub.com
- Setya, Budi Candra. 2015. "Ramai Seni Budaya Banyuwangi di Banyuwangi Ethno Carnival." *Tempo.com*. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/20/058711402/ramai-seni-budaya-banyuwangi-di-banyuwangi-ethno-carnival>. (7 November 2015).
- Soekanto, Surjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Pembentukan Dewan Kesenian Blambangan Tahun 2010-2013.
- Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Pembentukan Dewan Kesenian Blambangan
- Sutarto, Ayu dkk. 2004. *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Jember: Kompyawisda Jatim.
- Tuloli, Nani dkk. 2003. *Dialog Budaya Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: CV Mitra Sari.
- UNESCO. 2017. *Creative Industries*. <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/>
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com). <http://travel.kompas.com/read/2015/10/15/193400627/Banyuwangi.Ethno.Carnival.2015.Hadirkan.Busana.Pengantin.Suku.Using>
- [www.rmol.co](http://www.rmol.co). <http://nusantara.rmol.co/read/2016/11/12/268187/Banyuwangi-Ethno-Carnival-Tingkatkan-Ekonomi-Rakyat>
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com). <http://travel.kompas.com/read/2017/11/13/210600727/banyuwangi-ethno-carnival-2017-angkat-tema-majestic-ijen>